

IMPLEMENTASI WAJIB PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN DI KOTA TANGERANG

Dodi Subagia

STISIP Yuppentek Tangerang

Email: dodidodi1804@gmail.com

Abstract

The policy of the Tangerang City Government in increasing compulsory basic education that must be taken by its people from 9 years to 12 years, especially in increasing the number of senior high school public schools, is felt by private school managers to be a threat to its continued implementation, with an indication of a decrease in the number of people interested in school in schools that are managed by the private sector. The results of the analysis show that the existence of this policy must be responded positively by private school managers to further improve the quality of learning in schools. In fact, the decline in the number of students in private schools is more dominant by the emergence of new schools that offer a much better quality of learning.

PENDAHULUAN

Salah satu program pembangunan yang monumental di Kota Tangerang adalah dibidang pendidikan. Pada kepemimpinan Daerah Pasangan H. Arief Wismansyah dan H. Sahrudin, Kota Tangerang menjadi barometer pendidikan nasional dengan program pendidikan dasar 12 tahun, dimana tingkat nasional baru 9 tahun. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan di Kota Tangerang dapat dinilai paling baik di tingkat nasional, dengan adanya rehabilitasi pembangunan sekolah dan diperbanyaknya sekolah-sekolah negeri, agar masyarakat mampu mengikuti program pendidikan dasar 12 tahun dengan biaya yang terjangkau. Selama ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan seringkali mengeluhkan biaya pendidikan yang mahal. Akan tetapi Pemerintah Kota Tangerang sudah mampu menekan biaya ini agar terjangkau oleh masyarakat, salah satunya adalah dengan memperbanyak sekolah-sekolah negeri. Dengan meningkatnya jumlah sekolah negeri ini, selain didukung dengan ketersediaan sarana dan prasana belajar dan mengajar yang memadai, biaya pendidikannya pun relatif terjangkau oleh masyarakat.

Sebab untuk kegiatan operasional sekolah, pihak sekolah dibantu oleh ketersediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, sehingga dalam tataran implementasinya dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Tangerang. Selama duet kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah era 2013-2018 telah berhasil meningkatkan jumlah sekolah-sekolah negeri. Untuk pendidikan tingkat SLTA, beliau telah berhasil meningkatkan jumlah sekolah negeri, yakni SMAN dari 9 sekolah, saat ini menjadi 15 sekolah dan SMKN dari 4 sekolah saat ini menjadi 19 sekolah, MAN dari 1 menjadi 2 sekolah, yang menyebar di 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang.

Apabila dilihat dari penyelenggara pendidikan, terdapat dua penyelenggara, yaitu penyelenggaraan sekolah yang dikelola oleh pemerintah dan penyelenggaraan sekolah yang dikelola oleh swasta. Selama ini banyak anggapan bahwa sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah lebih murah dibandingkan yang dikelola swasta dan memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga para peserta didik yang akan masuk di sekolah negeri harus bersaing dulu, misalnya dari perolehan nilai Ujian Nasional peserta didik. Dengan adanya penambahan jumlah sekolah negeri di Kota Tangerang, maka kesempatan bagi peserta didik untuk masuk di sekolah negeri menjadi semakin luas. Akan tetapi di satu sisi lain, peningkatan jumlah sekolah negeri ini dianggap sebagai suatu ancaman bagi para penyelenggara sekolah yang dikelola oleh swasta.

Sebut saja salah satu sekolah swasta yang ada di wilayah Cikokol Kecamatan Tangerang, sebelum adanya kebijakan penambahan jumlah sekolah, sekolah swasta ini menjadi primadona bagi masyarakat dan peserta didik, sehingga bagi peserta didik yang berminat sekolah di sekolah ini harus menempuh seleksi, karena ketersediaan ruang kelas yang terbatas. Akan tetapi setelah terjadi penambahan sekolah negeri, banyak ruang kelas di sekolah ini menjadi kosong. Dengan demikian, bagi penyelenggara dan pengelola sekolah-sekolah swasta tingkat pendidikan menengah, adanya kebijakan Pemerintah Kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjadi persoalan tersendiri.

ANALISIS PERMASALAHAN

Pro kontra kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah merupakan sebuah konsekuensi, termasuk pengambilan kebijakan oleh Walikota Tangerang dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan meningkatkan wajib pendidikan dasar dari 9 tahun (barometer nasional) menjadi 12 tahun untuk Kota Tangerang. Untuk mensukseskan kebijakan wajib pendidikan dasar 12 tahun maka jumlah sekolah negeri menengah atas baik SMA, SMK atau MAN ditingkatkan. Dengan adanya peningkatan ini, jumlah peserta didik yang dapat ditampung di sekolah-sekolah negeri menengah pertama menjadi semakin besar.

Karena sekolah di sekolah negeri diyakini memiliki biaya yang lebih murah, maka kesempatan masyarakat untuk menuntaskan wajib pendidikan dasar 12 tahun di Kota Tangerang pun menjadi semakin tinggi, sehingga diharapkan di Kota Tangerang memiliki sumber daya manusia yang mencukupi dan memadai dalam menghadapi tantangan global di masa yang akan datang. Namun bagi para penyelenggara sekolah-sekolah menengah yang dikelola oleh pihak swasta menjadi sebuah ancaman. Contoh sekolah swasta yang merasa bahwa dengan adanya kebijakan ini adalah ancaman adalah salah satu sekolah swasta yang berlokasi di Cikokol Kecamatan Tangerang, yang sebelum adanya kebijakan ini, masyarakat yang ingin bersekolah di sekolah swasta ini mungkin harus antri dan lulus seleksi. Pada saat ini, tanpa dilakukan seleksi pun para calon peserta didik yang akan masuk ke sekolah ini sudah relatif lebih rendah, dengan indikator terdapat beberapa ruang kelas yang kosong pada sekolah swasta ini. Padahal dulunya tidak pernah terjadi.

Apabila sekolah swasta yang dulunya termasuk pada kelas favorit yang diminati oleh masyarakat mengalami degradasi calon peserta didik, maka tentunya kondisinya akan menjadi lebih mengkhawatirkan bagi sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta yang memiliki grade di bawah sekolah tersebut. Bagi penyelenggara sekolah-sekolah swasta, peserta didik merupakan sebuah aset dalam penyelenggaraan sekolah, karena untuk membiayai operasional sekolah termasuk gaji guru berasal dari biaya yang diperoleh dari biaya SPP siswa. Dengan berkurangnya jumlah siswa, maka secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan sekolah dalam membiayai biaya operasional sekolah.

Kondisi ini bagi para pengelola sekolah swasta menjadi sebuah ancaman, karena beban sekolah menjadi lebih berat. Kejadian ini dialami oleh sekolah swasta yang ada di Cikokol tersebut, dimana pada tahun berselang pihak pengelola terpaksa merumahkan beberapa guru dan tenaga administrasi pendukung. Bahkan apabila di tahun-tahun ke depan tidak mengalami perubahan dalam angka peserta didik bahkan dimungkinkan terus menurun, maka sekolah-sekolah swasta akan terancam bubar. Lebih dramatis lagi terhadap sekolah-sekolah swasta yang memiliki *grade* di bawah sekolah Swasta yang ada di Cikokol dan bukan merupakan sekolah favorit. Sebelum adanya penambahan sekolah negeri jumlah peserta didik yang menjadi siswa sekolah sudah sangat terbatas, apalagi setelah adanya kebijakan ini, maka kebangkrutan sekolah seolah selalu membayangi.

PEMBAHASAN

Secara makro, apabila banyak terjadi sekolah swasta yang tutup pengelolaannya, maka akan berdampak pada penambahan jumlah pencari kerja di Kota Tangerang yang berasal dari penyelenggara sekolah swasta, guru swasta dan tenaga administrasi pendukung. Namun apabila penulis bandingkan dengan sekolah swasta lainnya, di wilayah yang sama, seperti Sekolah BPK Penabur, adanya kebijakan pemerintah yang menambah jumlah sekolah menengah negeri tidak berpengaruh. BPK Penabur merupakan salah satu sekolah swasta yang sudah memiliki prestasi akademik dan non akademik yang cukup baik, bahkan tembus ke tingkat nasional. Pada tiap tahunnya peminat yang akan memasuki sekolah ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ruang kelas yang tersedia, sehingga pihak penyelenggara membatasi dengan cara seleksi dan penerapan biaya sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta lainnya.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka penulis menganggap bahwa tidak semua dari kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam mengimplementasikan wajib pendidikan dasar 12 tahun, yang salah satu caranya dengan menambah jumlah sekolah menengah lanjutan negeri direspon negatif, karena sebagian besar justru sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun untuk pengelola sekolah swasta dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan pengelolaan sekolahnya dengan parameter peraih prestasi belajar siswa didiknya, seperti yang dilakukan oleh pengelola BPK Penabur.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Tangerang ini justru menurut penulis harus dijadikan motivasi oleh para pengelola sekolah menengah lanjutan agar lebih mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya, sebab jika bila para pengelola tidak kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan proses belajar dan mengajar maka akan terdegradasi oleh sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta lainnya. Selama ini menurut pengamatan penulis, banyak sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta yang memberdayakan tenaga pengajar (guru) atau tenaga penunjang administrasi didasarkan atas kekeluargaan, bukan atas profesionalitas, kompetensi dan kemampuan. Sehingga rekrutmen tenaga pengajar dan tenaga administrasi penunjang terkesan asal-asalan dan akibatnya pada kualitas hasil proses belajar mengajarnya yang tidak signifikan terhadap prestasi belajar siswa didiknya. Hal ini berbeda dengan sekolah negeri yang memiliki standar dan parameter rekrutmen ketenagaan yang baik. Bahkan untuk beberapa sekolah swasta dalam merekrut tenaga pengajar dan penunjang administrasi dilaksanakan dengan parameter yang lebih tinggi, baik kompetensi dan unsur penunjang lainnya, seperti kemampuan berkomunikasi dengan beberapa bahasa asing.

Penurunan siswa didik yang masuk di sekolah-sekolah swasta, menurut penulis tidak hanya diakibatkan oleh dominasi adanya kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam mengimplementasikan wajib pendidikan dasar 12 tahun dengan penambahan jumlah sekolah negeri, sebab terdapat variabel lain yang mempengaruhi diantaranya adalah munculnya sekolah-sekolah swasta baru yang memiliki kualitas pengelolaan sekolah yang lebih baik daripada sekolah swasta yang lebih dahulu ada. Sekolah-sekolah swasta baru ini terbukti memiliki brand image cukup baik di mata masyarakat, terbukti walaupun sekolah relatif baru tetapi mereka tidak pernah kekurangan jumlah siswa bahkan peminatnya jauh dari ketersediaan daya tampung ruang kelasnya.

Sekolah-sekolah swasta yang baru walaupun banyak bermunculan di perumahan-perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang ataupun Tangerang Selatan akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan Kota Tangerang maka mempengaruhi sekolah swasta yang ada di Kota Tangerang itu sendiri. Saat ini banyak sekolah swasta baru yang dibangun di daerah perumahan, seperti Modernland, Summarecon, Gading Serpon, Alam Sutera, Lippo Karawaci dan BSD. Selain fasilitas sekolah yang memadai, para penyelenggara sekolah swasta ini juga menawarkan kurikulum tambahan yang menjadi keunggulan spesifiknya dan tenaga pendidik yang profesional. Kondisi ini tidak mampu diimbangi oleh pengelola sekolah swasta lainnya yang cenderung kurang responsif terhadap perubahan kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi di lingkungannya.

Selain itu, menurut penulis apabila dilihat dari variabel pertumbuhan penduduk Kota Tangerang yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat, seharusnya bukan menjadi persoalan terhadap jumlah peserta didik apabila kondisi lainnya dianggap tetap. Sebagai contoh, dengan adanya penambahan sekolah negeri di Kota Tangerang, apabila pertumbuhan penduduknya signifikan terhadap jumlah peserta didik tiap tahunnya, maka jumlah peserta didik yang sekolah di sekolah swasta cenderung tetap. Karena penambahan jumlah sekolah negeri akan diimbangi dengan jumlah penduduk atau peserta didik tiap tahunnya.

Dengan demikian kecemasan yang terjadi dan dirasakan oleh para pengelola sekolah lanjutan swasta ini menurut penulis bukan hanya diakibatkan oleh adanya implementasi kebijakan wajib pendidikan dasar 12 tahun dengan menambah sekolah-sekolah negeri baru, melainkan lebih dominan diakibatkan oleh kinerja pengelola swasta itu sendiri yang relatif kurang responsif terhadap kebijakan, dan respon ini mampu dijawab oleh pihak pengelola swasta lainnya. Sehingga saat ini, para pengelola sekolah swasta yang merasa kurang mendapatkan minat dari masyarakat harus mampu berinstropeksi dalam pengelolaan penyelenggaraan belajar mengajarnya.

Penulis juga menelaah bahwa kebijakan Pemerintah Kota Tangerang untuk meningkatkan wajib pendidikan dasar dari 9 tahun menjadi 12 tahun dengan cara menambah jumlah sekolah negeri menengah lanjutan sudah baik, karena masyarakat memiliki kesempatan jauh lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah negeri dan bagi sekolah swasta kebijakan ini harusnya direspon positif dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya. Sehingga apabila pihak Pemerintah Kota Tangerang dan pihak pengelola sekolah swasta memiliki kesepahaman yang sama, maka tujuan Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kualitas pembangunan di bidang pendidikan dengan mencetak sumber-sumber daya manusia yang berkualitas akan berhasil.

PENUTUP

Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan wajib pendidikan dasar yang harus ditempuh masyarakatnya dari 9 tahun menjadi 12 tahun, khususnya dalam menambah jumlah sekolah negeri menengah lanjutan atas dirasakan oleh pengelola sekolah swasta menjadi sebuah ancaman bagi keberlangsungan penyelenggaraannya, dengan adanya indikasi menurunnya jumlah masyarakat yang berminat sekolah di sekolah yang pihak swasta kelola. Hasil analisis menunjukkan adanya kebijakan ini harus dapat direspon positif oleh pengelola sekolah swasta untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajarannya di sekolah.

Pada kenyataannya, menurunnya jumlah peserta didik di sekolah swasta lebih dominan oleh munculnya sekolah-sekolah baru yang lebih menawarkan kualitas pembelajaran yang jauh lebih baik. Pada akhir tulisan ini penulis merekomendasikan beberapa buah pikir atas hasil penelitian, diantaranya:

1. Dalam rekrutmen tenaga pengajar dan tenaga administrasi pendukung harus didasarkan kompetensi, profesionalitas dan kemampuan pelamar, bukan atas kekeluargaan.
2. Pengelolaan pendidikan swasta harus sudah lebih terbuka kepada masyarakat dan bukan menjadi pendidikan komersil keluarga semata, sehingga mampu menyerap aspirasi masyarakat sebagai konsumen jasa pendidikan itu sendiri.
3. Pengelola sekolah swasta harus mampu lebih efisien dalam pengelolaan pendidikannya agar ke depan mampu menginvestasikan dananya dalam penambahan aset sekolah guna meningkatkan fasilitas belajar mengajar.
4. Di sekolah swasta diperlukan inovasi dan kreatifitas kurikulum spesifik yang menjadi unggulan sekolah, agar menjadi daya tarik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

